Pleidooi

EDISI I/X/1999

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

Semester Pendek Ada Apa ?!

SEGALA SESUATU TERUS MENGALIR...

(Heraclitus)

Segala sesuatu terus mengalir dan berkembang , banyak hal yang perlu di bicarakan dan dijadikan bahan renungan.Sama hal nya zaman orde baru , di jaman orde transisi keadaan hukum selalu menjadi pihak yang dikalahkan dan dilecehkan .Tidak ada itikad baik baik dari mas Habibie untuk menegakkan supremasi hukum, sepertinya zsia-sia perjuangan teman -teman kemarin saat reformasi. Kita tidak bicara jauh tapi masih di sekitar fakultas ,karena di fakultas tertua ini kejadian dan hal menarik selalu ada dan berkembang..

Pleidooi kali ini -yang dikerjakan oleh awak Mahkamah periode 1999/2000 yang baru tahap belajar kembali- mengulas apa yang di rasa janggal dan mengangkat isu-isu yang muncul di fakultas. Kita bicara dan mengulas masalah Semester Pendek , Realisasi Tuntutan Mahasiswa Fakultas Hukum (Forbes) , isu pembentukan Forkoma dan yang terakhir pembubaran BEM dan Senat UGM.

Seharusnya kita berpikir untuk apa teriak menuntut perubahan di negara ini sedangkan di dalam - fakultas kita - masih banyak yang perlu dibenahi. Kita fakultas tertua namun cuma sekedar kebanggaan semu yang di banggakan , mana kualitas kita ? Ingat perjuangan kita belum selesai, perlu banyak lagi oposan-oposan untuk membawa fakultas ini ke jalan yang lurus(Sirathal mustaqim).Berbenahlah fakultas hukum,jadilah yang terbaik atau yang terburuk sekalian. ▪

Tim Pleidooi:
Retno Palupi, Erickson H. Gultom, Suryo Y. Prabowo, Supriyadi W. Eddyono, Fajrimei, Wahyu Wagiman, Emerson Y. , Turniyadi, Syarifudin, Ratna Puri P., Zaenal Abidin, Hosnu El Wafa ,Fitri Tarakanita, Heri Yanuari Bramantyo, W. T. Wibowo, Dicky R.S.
Diterbitkan oleh : **MAHKAMAH**

EKSEPSI

Semester Pendek : NO GUARANTEE!

Emerson Yuntho

Semester pendek (SP) bukanlah sebuah jaminan untuk mendapatkan nilai bagus, sebab jika anda malas dan bermasalah maka tidak mustahil nilai D dan E ,yang akan diterima."Harus di ingat bahwa standar penilaian dalam SP sama dengan semester reguler , jadi jangan heran bila hasil SP tidak lebih baik daripada semester reguler , bahkan bisa lebih jelek apabila kalian tidak rajin belajar," begitu penegasan Prof.Soegeng Istanto, seperti dikutip dalam edisi Pledooi 1997. Hal senada juga diungkapkan Pak Amin, ketua panitia SP di FH tahun ini, bahwa panitia SP tidak bisa menjamin yang ikut SP nilainya akan baik.

Jadi jika anda mengikuti SP tanpa belajar dan usaha keras maka lupakanlah untuk mendapat nilai bagus.

Berkah SP

Penyelenggaraan SP ternyata tidak hanya menguntungkan bagi mahasiswa , karena ' dianggap' dapat mempercepat masa studi dan memperbaiki IP komulatif, bagi dosen dan karyawan pun, kegiatan SP ternyata memiliki berkah tersendiri .

Berdasarkan kesepakatan Pengelolaan SP tahun 1998, Untuk dosen atau pengajar diberikan honorarium sebesar Rp. 125.000 per SKS perkelas, menurut Pak Amin , uang transport untuk dosen dalam sekali mengajar sebesar Rp.7500,- , untukpembuatan soal sebesar Rp. 25.000,- dan untuk koreksi ujian akhir sebesar Rp. 1000,- per mahasiswa.

Sebagai ilustrasi misalnya, Dosen X dengan bobot 4 sks dengan jumlah 30 mahasiswa maka pendapatannya dari mengajar, koreksi soa ldan transport selama 6 pekan adalah sebesar Rp. 690.000,- belum lagi jika dosen-dosen tersebut menjadi pengawas ujian , yang besarnya Rp. 12.500,- setiap mengawas,menjadi panitia inti pelaksanaan SP mungkin sekitar Rp. 1.000.000,- bisa dibawa pulang.

Namun menurut Pak Amin pendapatan dosen dari SP sebenarnya sedikit sekali jika dibandingkan kalau dosen melakukan kegiatan diluar "demi anak didik kita juga kan Mas."ucapnya.

Tapi dengan adanya SP pasti mempunyai berkah dan kenikmatan tersendiri kan Pak ? ■

PEROLEHAN NILAI SEMESTER PENDEK 1998

Nilai	Jumlah	Persen
-Nilai A	= 259 0rang	(22.96%)
-Nilai B	= 378 Orang	(33,51%)
-Nilai C	= 376 Orang	(33,33%)
-Nilai D	= 91 Orang	(8,07%)
-Nilai E	= 24 Orang	(2,13%)
Jumlah	**= 1128 Orang**	**(100%)**

(Sumber Bagian Akademik FH UGM)

Mata Kuliah Baru Oough...Senangnya!!

Syarifudin

Pengambilan Mata Kuliah Baru dalam semester pendek tahun 1999 ternyata menimbulkan " pro dan kontra" dikalangan mahasiswa FH UGM. Di pihak yang pro, kebijakan tersebut dianggap sangat menguntungkan mahasiswa karena dapat mempercepat studi dan memperbaiki IP kumulatif. Dani angkatan '96 ketika dimintai komentarnya terhadap pengambilan mata kuliah baru mengatakan "setuju aja, kenapa enggak asal bukan sebagai ajang jual beli nilai, jadi harus benar-benar murni, jangan karena kita membayar minimal dapat nilai B." katanya bersemangat, hal itu juga didukung oleh Pak Nindyo ,"Jika idenya percepatan studi mengapa dilarang." katanya dengan sedikit santai.

Sedangkan di pihak yang Kontra yang ternyata lebih banyak didukung kalangan mahasiswa 'semester banyak' (baca: mahasiswa angkatan tua) mereka menganggap pengambilan mata kuliah baru dalam SP bisa melahirkan pendidikan hukum yang instan ." Mau dapat apa mereka dalam waktu enam minggu , coba deh bayangkan !" komentar Sandy, mahasiswa angkatan 92 dengan berapi-api." boleh sih ambil baru tapi ya cuma MKDU saja ,kalau ambil mata kuliah inti lebih baik dengan Kuliah Reguler ", ujarnya lagi.

Hali ini mendapat sanggahan dari Pak Nindyo Dekan FH, "Ooh.... itu sih 'relatif", anda mau katakan 4 tahun itu instan dan 8 tahun itu tidak instan, apa anda bisa menjamin yang 4 tahun itu kalah dengan yang 8 tahun atau sebaliknya. Nanti dululah, jangan langsung lari ke masalah instan atau tidak. katanya serius.

Ucapan dari Pak Nindyo tersebut benar juga , tapi perlu diperhatikan dengan serius apakah perkuliahan SP sudah bisa dikatakan efektif bila mengingat bahwa SP ini hanya dilaksanakan hanya 6 minggu dan materi yang diberikan oleh dosen juga hanya berusaha meyegarkan kembali ingatan . Bisa dibayangkan jika mahasiswa yang bersangkutan baru menempuh mata kuliah yang baru . Namun semuanya itu terpulang kembali pada sang mahasiswa apakah merasa cukup atau tidak dengan hasil SP kalau ■

"Aku Nggak Ada Duit Buat Ngambil SP..."

Emerson Yuntho

Ketika mahasiswa sibuk antri diloket administrasi guna mengurus registrasi semester pendek (SP), tepat didepan Ruang I yang sedang direnovasi dan yang lainnya sibuk membicarakan tentang mata kuliah yang diambilnya kelak, Farhan hanya bisa memandang lesu. " Aku nggak ada duit untuk ngambil SP ," akunya.

Memang penyelenggaraan SP di fakultas ini , disatu sisi mungkin sangat menguntungkan mahasiswa tetapi disisi yang lain ternyata menimbulkan masalah yang sering tidak kita sadari . Kesenjangan mungkin salah satunya Karena ternyata tidak semua mahasiswa mampu mengikuti SP .

"Bagaimana tidak, hanya orang-orang yang berduit saja yang mampu mengambil SP dan selanjutnya cepat lulus," ujar Farhan kesal . Pihak penyelenggara SP mungkin tidak menyadari ternyata masih banyak mahasiswa kita yang tidak mampu secara ekonomi namun punya keinginan kuat untuk mengikuti SP ini Bagi sebagian besar mahasiwa uang sebesar Rp 12.500 / SKS masih dianggap terjangkau bahkan masih dalam hitungan murah namun bagi yang lain, ternyata sebaliknya.

Pihak Penyelenggara SP mungkin sudah seharusnya menjembatani sekaligus memikirkan mahasiswa-mahasiswa yang belum beruntung tersebut untuk bisa menikmati SP , misalnya dengan memberi keringanan atau mungkin juga dibebaskan dari kewajiban membayar SP. Harapan kita semua, semoga tahun depan SP dapat dinikmati oleh seluruh teman-teman mahasiswa ■

Realisasi Tuntutan Mahasiswa

Dari Atap Senilai 430 Juta hingga Keamanan di Fakultas

Fajrimei

Pada Aksi tanggal 20 Mei 1999, mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam **Forum Bersama** (FORBES) telah mengajukan empat tuntutan pokok terhadap pihak Dekanat yang terkait dengan peningkatan mutu dan perbaikan FH-UGM. Masing-masing tuntutan tersebut, yaitu pembentukan Laboratorium Hukum, perbaikan sistem pengajaran, perbaikan prasarana perkuliahan, serta pemangkasan birokrasi fakultas, telah diamini oleh pihak Dekanat. Dalam arti, pihak Dekanat tak dapat memungkiri kalau keempat tuntutan tersebut memang mutlak dilakukan agar FH-UGM benar-benar bermutu, bukan sekedar berlindung di balik nama besar. Tapi sejauh ini apakah realisasi dari sebagian tuntutan itu sudah berjalan logis?

Dodo

Perbaikan ruang I

Ketika FORBES dilaksanakan, Dekan, menanggapi isu perbaikan ruang I pernah menjelaskan, "Sebenarnya permohonan pembangunan gedung sudah dilakukan sejak Prof. Koesnadi menjabat Rektor, tapi entah mengapa FH selalu disingkirkan". Pihak Universitas sendiri menjelaskan bahwa perbaikan atau pembangunan gedung baru bisa dilakukan jika ada permohonan, ada dana dan prioritas. Baru kali inilah keinginan Fakultas Hukum dikabulkan dan sejumlah dana yang dibutuhkanpun dialokasikan.

Kepada **Pledooi**, Biro Administrasi Perlengkapan Universitas menginformasikan bahwa dana yang diturunkan untuk memperbaiki ruang I adalah sebesar Rp. 430 juta. Jumlah tersebut dialokasikan masing-masing untuk perbaikan konstruksi atap, mengganti genteng, pengecatan dan perbaikan WC. Pihak fakultas ternyata mengajukan pula tuntutan alokasi dana untuk perbaikan lantai dan sistem suara, namun tidak dipenuhi oleh pihak Universitas. Diketahui juga ternyata kontraktor yang melakukan perbaikan tidak melalui proses tender , tapi langsung ditunjuk oleh Universitas dengan alasan efisiensi waktu.

Dengan dilaksanakannya perbaikan ini , semoga tercipta keadaan perkuliahan yang kondusif , minimal mahasiswa hukum tidak takut lagi kuliah di ruang satu bila turun hujan. Cuma, jika dana sebesar Rp. 430 juta dapat diturunkan, tidakkah lebih penting kiranya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat dan mampu secara langsung menunjang mutu FH-UGM? Tidak sekedar untuk perbaikan atap dan WC. Alokasikan saja misalnya untuk perbaikan pengajaran atau pemangkasan birokrasi yang keduanya dapat diatasi dengan komputerisasi.

Keamanan fakultas dan parkir motor

Pada bulan Juli 1999 yang lalu di Fakultas Hukum telah terjadi pencurian , yaitu dua motor dan satu buah komputer milik Majestic-55. Berarti dalam tempo satu bulan saja telah terjadi tiga kali pencurian. Kok bisa ?

"Jumlah satpam di Fakultas Hukum hanya ada enam orang yang bekerja secara bergantian, sedangkan untuk malam hari hanya

dijaga dua orang.Dengan jumlah enam satpam yang dirasa kurang, ditambah lagi dengan areal yang luas dan terbuka, maka orang bisa saja masuk secara bebas melalui jalan lain, " jelas satpam senior Pak Paridjan. "Untuk itu diperlukan jumlah satpam yang lebih banyak agar fakultas benar- benar aman,"yakinnya. Mungkin setiap sudut fakultas perlu didirikan pos satpam agar keamanan dapat benar-benar terjaga dan mahasiswa tidak perlu lagi merasa was-was akan kehilangan barang miliknya.

Tapi apakah itu menjamin? Tempat parkir motor saja selama ini tidak teratur , sempit, dan tidak aman. Petugas parkir juga kurang konsisten terhadap kewajibannya. Jangankan turun tangan untuk menertibkan parkir yang semrawut, mereka malah asyik main halma untuk menghibur diri atau memetik *ukulele* guna menghilangkan kejenuhan mengurus dan memperhatikan motor yang keluar masuk. Setelah ada yang kehilangan motor, barulah pihak fakultas sibuk meningkatkan keamanan parkir. ■
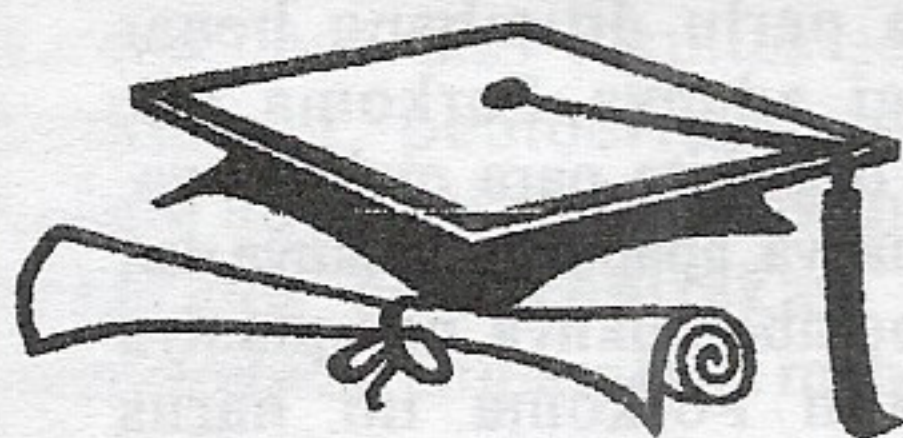
Bapak Nugroho Amien,S.H.

Ketua Panitia Pelaksana Semester Pendek FH UGM 1999

"Mendingan Mojok di Sana Dapat Duit Okeh...,ya Mas."

Dalam menyoroti pelaksanaan SP tahun ini, **Pledooi** mewawancarai Pak Amin seputar SP di fakultas hukum.

Pledooi (P): ***Sepertinya tidak ada kordinasi penyelenggaraan SP antara FH dengan fakultas Sastra ?***

Pak Amin (A) : Sebenarnya untuk penyelenggaraan SP di UGM adalah kewenangan dari masing-masing fakultas namun dalam Pelaksanan di FH tampaknya Senat FH mengambil jalan sendiri mengadakan kerjasama dengan Fakultas Sastra tanpa melakukan koordinasi dengan Panitia SP di FH, jadi kalau kesannya semrawut itu bukan maunya panitia,tapi kita bisa saja mengadakan kerjasama dengan Satra sepanjang PD I menyetujui.

P : ***Bagaimana dengan Mata kuliah baru dalam SP tahun ini ?***

A : Dulu syarat mengambil mata kuliah dalam SP adalah pernah mengikuti dan ikut ujian , tapi Senat nyelonong lagi ke Rektorat, akhirnya diputuskan boleh ,tapi batasan 10 SKS tetap kita pegang asal harus memenuhi pra syarat.Mata kuliah baru yang diambil kita cek dan teliti namun mahasiswa terkadang mencari-cari kelengahan panitia denganmengambil mata kuliah yang sebenarnya belum memenuhi pra syarat. Jangan di kira saya tidak memantau mahasiswa. Di fakultas ekonomi mata kuliah baru juga boleh diambil, itu yang membuat Senat Fakultas Hukum iri sehingga menghadap Rektor,mbok ya, ngadep dekannya dulu baru dekannya ngadep rektor, ini tidak ngadep bapaknya tapi langsung madep mbahnya.

P : ***Berapa yang didapat dosen, panitia maupun fakultas dari penyelenggaraan SP kali ini ?***

A : Fakultas tidak minta jatah, buat dosen pun hanya dapat sedikit , kita kemarin juga tidak terima banyak, hitung -hitung mendingan "mojok" disana dapat duit okeh ya mas Namun ini semua demi anak didik saya.

P : ***Isunya uang dari SP ini di depositokan di bank ?***

A : Itu tidak benar , uangnya hanya kita titipkan di bank jadi bukan didepositokan,maksudnya biar aman. ■

Mahkamah
mengucapkan selamat
kepada kakak-kakak
yang akan diwisuda

Selamat atas terbitnya

Buku angkatan '96
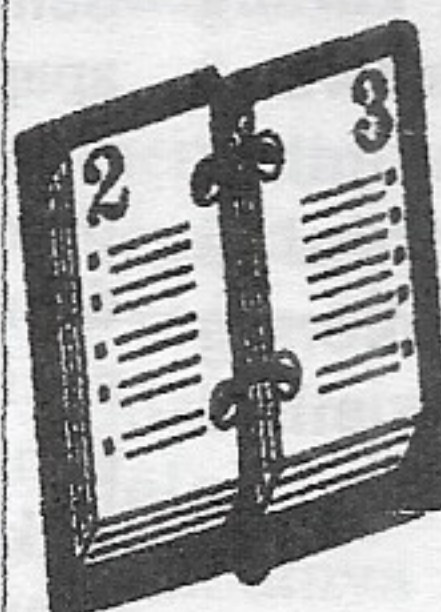
Terima kasih kepada temen-temen yang telah memberikan bantuan atas terbitnya buku ini

(Angkatan lain kapan menyusul?)

Forkoma :
Forum Pemeras OrangtuaMahasiswa ?

Ratna Puri Prapawati, Hosnu Elwafa,
Fitri Tarakanita, Erickson H.Gultom

Isu mengenai Forum Komunikasi Orang tua mahasiswa atau yang disingkat dengan FORKOMA tampaknya mulai santer didengungkan kembali di fakultas hukum berbarengan dengan munculnya Proyek Otonomi Kampus. Walaupun sebenarnya rencana pembentukan 'organisasi' ini sudah ada sejak dulu tapi karena mendapat tanggapan dingin dari mahasiswa, akhirnya berhenti di tengah jalan. Lucunya, ketika Tim Pleidooi menanyakan kebeberapa mahasiswa di FH mengenai rencana pembentukan FORKOMA, malah mahasiswanya yang berbalik bertanya, "Apa itu FORKOMA?" atau "Nggak pernah dengar, tuh."

FORKOMA atau apapun nama dan istilahnya, tampaknya bukan menjadi masalah karena tujuan atau maksud pembentukannyalah yang ternyata lebih diutamakan. Fakultas Farmasi misalnya memakai istilah PORTAMASI (Paguyuban Orang Tua Mahasiswa Farmasi), sedangkan Fakultas Kedokteran Umum, Kehutanan, Psikologi memakai istilah POTMA (Paguyuban Orang Tua Mahasiswa), sementara fakultas Ekonomi memakai istilah FORKOMA. Terbentuknya forum ini disamping bermanfaat sebagai ajang komunikasi atau ramah-tamah bagi para orangtua juga digunakan sebagai sarana penarik dana. Tapi tampaknya tujuan yang terakhir inilah yang diutamakan.

Anggapan bahwa Forkoma atau Potma sebagai ajang penarik dana dapat dibuktikan oleh hasil investigasi Tim **Pledooi** di beberapa fakultas di lingkungan UGM. Di fakultas Kedokteran Umum, Elvia (angk. 94 dan juga mantan Pemred "MEDICINA") menginformasikan bahwa POTMA atau FORKOMA tidak saja sebagai wadah untuk silaturahmi atau komunikasi tapi juga sebagai ajang penarikan dana. "Pada waktu pendaftaran mahasiswa baru sudah dibebani dengan uang Potma. Angkatan 94 dibebani uang Potma sebesar Rp. 500.000,- dan untuk angkatan 1995 sebesar Rp. 600.000,- dan seterusnya," ujarnya. Sementara di fakultas Kedokteran Gigi, Budi Setiawan menyatakan bahwa besarnya POTMA untuk angkatannya (angk. 97) adalah Rp. 2.000.000,-. "Pembayarannya bisa dicicil dan bagi mahasiswa dari golongan kurang mampu mendapat potongan hingga 75 %," ujarnya. Berarti di sini uang POTMA tersebut setiap periode mengalami kenaikan dan untuk mekanisme pembayarannya bisa dicicil (selama menjadi mahasiswa) sampai lunas. "Uang POTMA tersebut harus dilunasi oleh mahasiswa. Hal ini merupakan suatu kewajiban, karena kalau tidak pihak fakultas akan memberikan sanksi berupa penundaan wisuda," jelas Elvia lagi.

Apakah pengelolaan dana-dana tersebut transparan? "Cukup transparan", tegas Elvia. Elvia menuturkan bahwa uang POTMA tersebut digunakan untuk membeli alat-alat laboratorium, pengadaan buku-buku perpustakaan dan pemberian bantuan dana kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa. Walaupun demikian, Widi (ketua Senat Fak. Kehutanan) menyatakan bahwa baik senat maupun BEM fakultas Kehutanan pada prinsipnya tidak setuju jika POTMA dijadikan "mesin pencetak uang". "Kecuali dalam keadaan darurat , dalam arti kalau memang benar-benar membutuhkan dan kalau penarikan dana tersebut dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan," ujarnya. Lebih lanjut Widi juga mengatakan bahwa dana POTMA tersebut harus digunakan secara murni untuk kegiatan mahasiswa dan membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk bea siswa. " POTMA harus diaudit oleh pihak mahasiswa itu sendiri, yang dalam hal ini di wakili oleh senat, bersama pihak orang tua mahasiswa dan pihak fakultas," usulnya.

Bagaimana dengan rencana FORKOMA di Fakultas Hukum? Menurut Bapak Nindyo Pramono, Dekan FH UGM, "Pembentukan FORKOMA sangat membantu bagi pengembangan fakultas terutama dengan adanya otonomi kampus". Pak Nindyo juga mengatakan bahwa ide pembentukan FORKOMA ini sebetulnya sudah lama direncanakan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dari pihak senat terdahulu. "Menurut mereka FORKOMA digunakan sebagai forum pemerasan orang tua mahasiswa," Cerita Pak Nindyo. Beliau sangat tidak setuju dengan pendapat ini , oleh karena itu menurutnya untuk mencegah kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar maka Forkoma tersebut harus dibentuk secara transparan. "Pertanggungjawabannya tidak hanya kepada orang tua mahasiswa dan mahasiswa tapi juga ke masyarakat," Jelas Pak Nindyo.

Mekanisme pembentukan FORKOMA mungkin nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak senat. Namun ketika Tim **Pledooi** menanyakan langsung kepada Buyung Azhari, ketua senat FH UGM , ternyata senat belum mempunyai konsep yang pasti. "Rencananya pihak senat terlebih dahulu akan mengadakan forum yang mempertemukan para orangtua mahasiswa untuk memusyawarahkan mekanisme atau konsep apa yang dipakai dalam FORKOMA nantinya,' Ujar Buyung. Namun ditambahkannya lagi bahwa ada tidaknya FORKOMA nanti akan tergantung pada persetujuaan orang tua para mahasiswa. "Jadi tidak ada jaminan Forkoma terbentuk di fakultas hukum,"Tambahnya lagi.

Bagi fakultas dan senat tampaknya perlu ditimbang benar untung-rugi adanya Forkoma ini. Sementara bagi kita para mahasiswa, apapun namanya, apapun bentuknya dan siapapun pembentuknya nampaknya pembentukan Forkoma ini harus dibarengi dengan informasi dan sosialisasi yang benar, jelas, dan transparan. Karena tanpa hal tersebut maka Forkoma dapat diselewengkan oleh orang-orang yang hanya mengincar dananya saja. ■

PETISI

Tumpukan Amplop yang Bermasalah

Surya Y.Prabowo,Turniyadi

Dalam kegiatan pendaftaran mahasiswa baru di FH UGM , ada kebijakan agar mahasiswa baru menyerahkan amplop yang telah dibubuhi prangko guna pengiriman hasil studi ke orang tua mahasiswa sebagai evaluasi. Kebijakan untuk menyerahkan amplop ini memang dibenarkan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan, Pak Soemono, tetapi menurutnya hanya berlaku bagi dua angkatan saja yaitu angkatan 96 dan 97 kemudian untuk angkatan 98 dan seterusnya kebijakan ini dihentikan . Bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Soemono itu, menurut hasil investigasi Tim Pledooi kepada beberapa mahasiswa dari angkatan 94 dan 95, ternyata mereka juga dibebankan untuk menyerahkan amplop berikut perangkonya.

. Menurut Pak Rudjiono,PD I FH UGM ,dirinya sendiri tidak tahu menahu tentang adanya kebijakan untuk menyerahkan amplop itu. "Dulu sih, memang ada pemberitahuan hasil belajar mahasiswa pada orangtua mahasiswa melalui surat, tetapi karena dana dari fakultas semakin berkurang, pemberitahuan hasil belajar itu terpaksa dihentikan." Bila sekarang ada kebijakan untuk menyerahkan amplop bagi mahasiswa , Pak Rudjiono sangat menyesalkan karena menurutnya pemberitahuan hasil itu seharusnya dengan dana fakultas bukan malah membebani mahasiswa.

Menurut rencana, penyerahan amplop ini akan digunakan oleh fakultas untuk mengirimkan hasil belajar anak didiknya. Pengiriman hasil belajar itulah yang akan dipakai sebagai informasi perkembangan belajar mahasiswa oleh orangtua mahasiswa. Dan dari hasil belajar itu pulalah yang akan dipakai oleh pihak fakultas untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap anak didiknya sebagai evaluasi, apakah memenuhi syarat untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Dengan pengiriman hasil belajar selama 3 semester sebagai peringatan awal, diharapkan agar para orangtua dapat membantu mahasiswa yang bersangkutan agar dapat meningkatkan hasil belajarnya dan tidak kena "evaluasi".
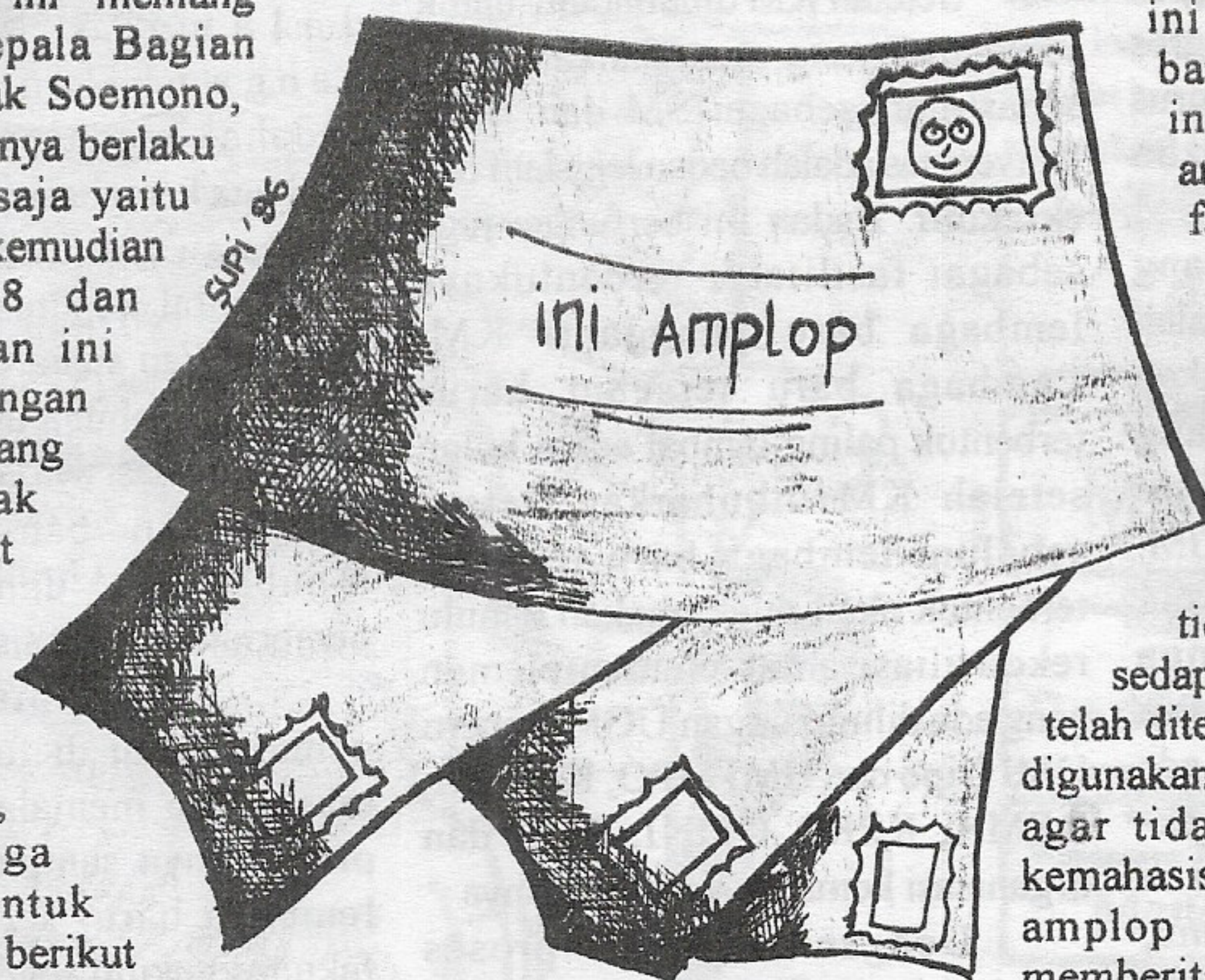
Tetapi sangat disayangkan memang bahwa pengiriman amplop kepada para orang tua tidak pernah terealisasi. Menurut Pak Soemono tidak berjalannya pengiriman hasil belajar yang telah lalu karena lambatnya pengeluaran nilai oleh dosen yang memberi mimbar. Menanggapi pernyataan ini, Pak Rudjiono mengatakan bahwa sebenarnya pengeluaran nilai itu sudah diberi batas maksimal 2 minggu setelah ujian akhir semester berakhir tetapi karena tiadanya sanksi yang tegas maka pihak dekanat hanya memberi teguran-teguran saja kepada para dosen yang memberi mimbar. Tidak adanya pengiriman hasil belajar ini menyebabkan masih banyaknya orangtua yang ingin tahu perkembangan anaknya dengan menelepon fakultas.

Pihak fakultas nampaknya sudah menyadari hal ini dan akan mengusahakan agar pengiriman hasil belajar dapat terlaksana semester depan. Tetapi apabila tidak dapat terlaksana maka sedapat mungkin amplop yang telah diterima selama ini lebih baik digunakan untuk manfaat yang lain, agar tidak bertumpuk dibagian kemahasiswaan. Misalnya amplop-amplop itu digunakan untuk memberitahu kepada para Sarjana Hukum kita yang baru lulus bahwa ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka.

Seperti kata pepatah lama, **"lebih baik terlambat daripada tidak samasekali."** Kegagalan karena kendala terlambatnya nilai yang keluar seharusnya tak terus-menerus terjadi apabila sejak semula fakultas membenahi segala macam administrasi yang terkesan carut marut dengan suatu sistem yang lebih baik dengan penggunaan teknologi. Komputerisasi mungkin bisa menjawab.■

SENAT dan BEM UGM
Rest In Peace

Wahyu Wagiman, Retno Palupi

Setelah pemerintahan Soeharto dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir , hal serupa juga terjadi terhadap pengurus KM UGM periode 1999/2000. Dalam kongres KM UGM yang di selenggarakan di kaliurang 6-10 juli1999 dan kongres LAFKIP 20-21 juli 1999 , kongres tesebut dihadiri pengurus - pengurus KM dan utusan dari organisasi extra kampus yang ada di UGM .Keputusan paling penting yang dihasilkan kongres KM tersebut ialah membubarkan KM dan digantikan dengan lembaga baru yang diharapkan dapat mengakomodasikan seluruh elemen yang ada di UGM. Mengenai pembubaran KM yang terkesan mendadak dan tanpa mengikutsertakan seluruh mahasiswa UGM itu sendiri disinyalir karena ada desakan-desakan kuat dari pihak-pihak yang tidak kebagian kursi di KM, namun demikian Ali Fahmi, ketua badan legislatif pemerintahan transisi mengatakan bahwa pembubaran ini KM sebagai langkah aspiratif terhadap tuntutan-tuntutan agar KM melakukan perubahan dan perbaikan sebab dalam pemerintahan KM terdahulu banyak pihak menganggap bahwa KM sebagai alat korporatif rektorat sehingga pembelaan terhadap hak-hak mahasiswa sangat kurang. Sedangkan menurut Buyung Azhari, ketua SMFH mengatakan bahwa ide pembubaran KM itu merupakan hasil evaluasi kongres KM terhadap pemilu raya UGM 1999 dimana jumlah pemilihnya anjlok dari tahun sebelumnya, sehingga tingkat legitimasinya harus dipertanyakan lagi , apakah KM masih diperlukan atau tidak?

Setelah KM dibubarkan untuk sementara yang menjalankan tugas sehari-hari sebagai SM dan BEM Universitas adalah badan legislatif dan eksekutif. Badan ini berfungsi juga sebagai fasilitator terbentuknya lembaga baru pengganti KM. Lembaga baru tersebut harus terbentuk paling lambat enam bulan setelah KM dibubarkan, tetapi sebelum lembaga baru tersebut terbentuk akan dilaksanakan dahulu rekonsiliasi antar elemen-elemen yang ada dilingkungan UGM, seperti HMI Dipo dan HMI MPO, KAMMI, DEMA, KPRP, GMNI, PMII dan organisasi kemahasiswaan lainnya

Dengan melihat proses pembubaran KM dan rencana pembentukan lembaga baru tersebut sekilas dapat dipahami posisi mahasiswa masih lemah terhadap wakil-wakilnya di KM, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, padahal mengingat pentingnya lembaga kemahasiswaan seharusnya mahasiswa diikutsertakan untuk mengambil keputusan, tidak hanya memberikan suara dalam PEMILU. Tentang pembubaran KM itu sendiri banyak mahasiswa UGM yang belum mengetahui bahwa KM telah dibubarkan dan digantikan pemerintahan transisi.

Sementara itu, untuk pemerintahan di fakultas-fakultas masih bisa menjalankan program-programnya sampai terbentuknya lembaga baru, sedangkan untuk fakultas hukum sendiri, seperti yang dikatakan Buyung.A bahwa SMFH dan BEMFH akan tetap melaksanakan programnya sampai lembaga baru terbentuk. ■

Dodo, Supi

IN ABSENTIA

Dosen di FH,jika meminjam buku di perpustakaan fakultas, tidak menggunakan kartu anggota,tidak ada jangka waktu,tidak ada denda,dan mungkin tidak dikembalikan.

***Untung cuma buku,**

Telah berpulang ke Rahmatullah, SENAT dan BEM UGM.

***Semoga arwah mereka diterima disisi-Nya.Amiiiiin.**

Bulan Juli lalu,telah terjadi tiga kali kehilangan di FH.

***Siapa sadar sudah lama kita kehilangan ilmu di sini.** **Le'Doi**